

Sam Salengke, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Maret 2003, *Analisis Penataan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sesudah Pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gowa)*, Ketua Komisi Pembimbing : Warsito Utomo, dan Anggota Komisi : Agus Heruanto Hadna.

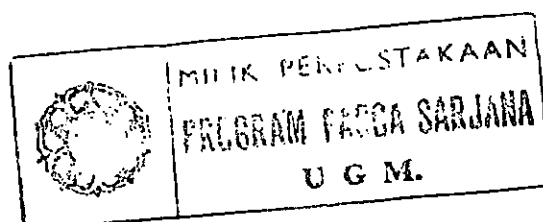
Implikasi sesudah pelaksanaan UU No.22 tahun 1999, yakni dengan adanya kewenangan yang luas diberikan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, termasuk dalam menata struktur organisasi pemerintah kabupaten. Permasalahan kemudian muncul ketika output dari penataan tersebut cenderung mengarah kebirokratisasi(Pembengkakan/Proliferasi). Permasalahan dalam penelitian ini adalah : "Mengapa" dalam penataan struktur organisasi pemerintah kabupaten Gowa terjadi kecenderungan birokratisasi ?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : akan mendeskripsikan dan menganalisis hal sebagai berikut: (1) Proses penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Gowa yang mengarah ke birokratisasi. (2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penataan organisasi pemerintah kabupaten Gowa sehingga terbentuk birokratisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Sesuai dengan tujuan penelitian, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu model interaktif melalui prosedur pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi lalu kembali lagi ke pengumpulan data apabila data masih kurang. Sedangkan untuk keabsahan data digunakan teknik pemeriksaan data yang didasarkan pada derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Lokasi penelitian adalah pada Organisasi Pemerintah Kabupaten Gowa.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai output penataan sangat kental dikarenakan adanya faktor budaya dan adanya aset kekuasaan yang melekat pada diri birokrasi sehingga performans dari wajah birokrasinya nampak birokratisasi(terjadi pembengkakan/proliferasi).

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian, maka penulis menyarankan: (1)Perlu untuk reorganisasi dengan memangkas organisasi yang ada , dengan mengurangi Asisten Sekda dari 4 unit menjadi 3 Unit atau sekalian dihapuskan saja sehingga Wakil Bupati yang ada dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya dari 20 Dinas yang ada kalau bisa dipangkas sampai 14 Dinas saja. Begitupun Kantor-Kantor yang mempunyai fungsi dan tugas yang relevan dimerger saja. (2)Pada pola penataan organisasi dimasa mendatang hendaknya sejauh mungkin dapat meminimalisir faktor-faktor kepentingan sehingga penataan organisasi benar-benar menjadi suatu upaya untuk mewujudkan organisasi yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.



Sam Salengke, Post Graduate Program, University Of Gadjah Mada, March , 2003, Organization Restructuring Analysis Of Local Government After The 1999 Laws No. 22, Implementation (Case Study On The Gowa Government). Supervisor : Warsito Utomo, Co-Supervisor : Agus Heruanto Hadna.

Implication after the enforcement of regulation Number 22 of 1999, of which by the emergence of extended authorities being given to the regional governments in managing their own territories, includes arranging the district government organization. Problems then occur when the output of such arrangement tends to lead into bureaucratization (Expansion /proliferation).

The problem in this research is: why the organization structuring in Gowa Regency incline to the bureaucracy?

The main goals from this research are: to describe and analyze the problems, such as; (1). organization structuring process in Gowa Regency Government toward to the bureaucracy. (2). variable that correlated with the process of organization structuring in Gowa Regency that make a bureaucracy.

This research is using the qualitative. To collect the data in this research, used by detail interview technique, documentation and observation. Appropriate the aim of this research, to analyze data using by Miles and Huberman Method. The method is an interactive model by the data collecting procedure, providing data, verification and back to data collecting if data is not enough, to make data validity using by data checking technique base on the degree of thrust, government transferring, dependent and certainty. Location of this research is in Gowa Regency especially at government organization.

The Organizational Structure of Gowa District Government as an output of the arrangement is severely strong due to the existence of cultural factors and authority's assets that adhere to the bureaucracy so that the performance of its bureaucracy profile seemed to be bureaucratization (experiencing expansion/proliferation).

For recommendations of study results, the author therefore suggests: (1) .needs reorganization by pruning the current organization through reducing the 4 units of Regional Secretary to 3 units or at the same time completely abolishing all of them, thus the recent District Vice-Officer could serve his job optimally. Furthermore, of the existing 20 Official Departments, where possible, they should be pruned to only 14 Official Departments. Likewise, Offices of having similar duties and functions should be merged. (2) in the future organizational arrangement pattern, it would be preferable to minimize the interest factors as far as possible so that the organizational arrangement is actually becoming an effort to realize organization that capable of contributing the best services for the community.

